

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Ibnu Taimiyah dalam analisisnya mempunyai pandangan yang jernih tentang mekanisme penetapan harga. Menurut Ibnu Taimiyah mekanisme penetapan harga BBM di Indonesia lebih disebabkan karena faktor perubahan pola permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Setidaknya ada tiga hal mempengaruhi perubahan pola permintaan dan penawaran yaitu faktor produksi, konsumsi, kondisi ekonomi, dan tingkat harga minyak internasional. Ibnu Taimiyah melanjutkan analisisnya, ia mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu seperti penurunan efektifitas ekonomi maka pemerintah bisa melakukan intervensi harga BBM pada tingkat harga tertentu dengan maksud untuk mendorong pergerakan ekonomi dan mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat akibat dari naiknya harga kebutuhan pokok. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa pemerintah mempunyai hak penuh untuk mengontrol harga karena sifat dari BBM yang memiliki kemaslahatan masyarakat luas, sehingga pemerintah perlu mengontrol secara penuh penentuan harga dengan syarat kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

- a. pada sisi produksi, perlu adanya perbaikan sumur-sumur yang lama baik berupa alat-alat pengilangan dan lainnya. Perlu diadakanya eksplorasi sumur baru untuk menambah jumlah produksi minyak dalam negeri, dengan cara mengalihkan sebagian dana relokasi subsidi BBM kepada sektor produksi minyak indonesia.
- b. Perlu adanya perbaikan pada sisi regulasi terkait pengawasan tugas SKK Migas dan BPH Migas karena rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Perlu juga mengatur atau memperpendek perizinan eksplorasi dan lainnya. Agar lebih efektif dan mempercepat waktu produksi.
- c. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah intervensi pemerintah untuk melakukan intervensi harga tetap perlu jika memang beban yang ditanggung oleh pemerintah terlalu berat. Namun pemerintah tidak serta merta mencabut secara penuh subsidi BBM. Perlu mengkaji ulang mengingat BBM menjadi faktor penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, sekiranya pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme subsidi mengambang yang artinya subsidi tetap disediakan dengan mekanisme bila terjadi penurunan ekonomi pemerintah perlu mengeluarkan subsidi tersebut.